

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31) dan faktor kunci dalam pengurangan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (World Bank, 2018). Instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pendidikan. Indonesia, sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, menghadapi tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau keluarga kurang mampu. Selain akses, kualitas pendidikan yang mencakup kompetensi guru, sarana dan prasarana, kurikulum, serta lingkungan belajar juga menjadi isu krusial. Tanpa kualitas yang memadai, akses semata tidak cukup menjamin hasil belajar yang diharapkan.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bagian dari kebijakan afirmatif untuk menjamin pendidikan inklusif (Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014). PIP memberikan bantuan tunai langsung kepada siswa miskin dan rentan miskin untuk mengurangi beban biaya pendidikan. Tujuan utama dari PIP adalah untuk secara langsung mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh keluarga kurang mampu. Beban ini mencakup berbagai pengeluaran personal yang harus dipenuhi siswa, seperti pembelian perlengkapan sekolah, seragam, biaya transportasi, uang saku, hingga biaya praktik atau uji kompetensi bagi siswa kejuruan. Dengan demikian, PIP berperan ganda tidak hanya membantu siswa yang masih bersekolah agar tidak putus di tengah jalan karena kesulitan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai daya tarik untuk

membawa kembali anak-anak yang sebelumnya sudah putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan mereka (Kemendikbud, 2020).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan afirmatif yang dirancang untuk menjamin pendidikan inklusif dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin. Program-program bantuan pendidikan semacam ini di Indonesia sering kali terhambat oleh masalah implementasi yang serius. Ada tiga dampak negatif bantuan tunai langsung terhadap peningkatan akses dan penyelesaian pendidikan, yaitu pertama masalah target penerima yang sering salah sasaran, kedua keterlambatan penyaluran dana dan yang ketiga kurangnya pengawasan terhadap bantuan dana. Suryadarma, (2017), menyatakan bahwa keberhasilan program bantuan pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kualitas implementasi, mulai dari ketepatan data penargetan, efisiensi waktu penyaluran, hingga sistem pengawasan yang ketat. Temuan ini menuntut adanya perbaikan struktural dan operasional yang mendalam dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial di Indonesia.

Secara umum, di Indonesia pelaksanaan program PIP di berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi. Di beberapa daerah, program ini berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Namun, di daerah lain, terdapat tantangan dalam hal pendataan yang akurat, keterlambatan penyaluran dana, dan kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Implementasi PIP sudah cukup baik dengan adanya dukungan dari sekolah dan orang tua, serta pemahaman yang baik terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Namun, masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.

Pelaksanaan Program ini berfokus pada pencapaian pemerataan pendidikan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini mengalokasikan bantuan pendidikan untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan tujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan memfasilitasi kelangsungan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Di tingkat Provinsi Aceh, upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan juga diikuti oleh berbagai kebijakan regional yang menargetkan pengurangan ketimpangan antarwilayah. Program PIP di Aceh memiliki tantangan tersendiri, baik dari segi distribusi dana maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program ini. Meskipun Aceh mendapat perhatian khusus dalam berbagai program bantuan pendidikan. Pelaksanaan PIP di Aceh menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, untuk mencapai tujuan yang optimal, diperlukan perbaikan dalam hal pendataan, penyaluran dana, dan pengawasan penggunaan bantuan. Koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait, serta peningkatan sistem pendataan dan pengawasan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa PIP dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Secara umum, PIP di Aceh telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, terdapat tantangan dalam hal pendataan yang akurat, keterlambatan penyaluran dana, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat program. Selain itu, terdapat juga laporan mengenai dugaan penyelewengan dana PIP di beberapa madrasah, yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang.

Pada tahun 2024, sebanyak 418.826 siswa di Aceh terdaftar sebagai penerima manfaat PIP. Jumlah ini terdiri dari 308.672 siswa untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang dikelola oleh Kemendikbudristek, serta 110.154 siswa madrasah (MI, MTs, MA) yang dikelola oleh Kemenag. Anggaran untuk PIP di Aceh pada tahun 2024 mencapai Rp900 miliar, dengan rincian Rp422 miliar untuk MI, Rp558 miliar untuk MTs, dan Rp320 miliar untuk MA. <https://aceh.kemenag.go.id/>.

Sebagai program bantuan sosial yang berfokus pada penyediaan dana untuk biaya pendidikan, PIP tidak hanya bertujuan untuk membantu mengurangi hambatan finansial bagi peserta didik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. Namun, bantuan finansial semata cukup untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor kualitas pengelolaan program di tingkat implementasi, termasuk di madrasah yang menerima bantuan, memainkan peran penting dalam memastikan dampak positif dari program tersebut.

Salah satu contoh implementasi program PIP di Aceh adalah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie, sebuah Madrasah menengah atas yang terletak di Kabupaten Pidie. Meskipun penerima bantuan PIP di Madrasah ini cukup signifikan, tidak ada evaluasi yang mendalam mengenai sejauh mana program ini telah berhasil mengatasi masalah akses pendidikan dan kualitas pembelajaran. Padahal, data awal menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang menerima bantuan PIP berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang cukup signifikan, yang seharusnya menjadikan program ini sangat relevan dalam mendukung kelanjutan pendidikan mereka. Namun, persoalan yang muncul adalah adanya potensi ketidakefektifan dalam distribusi bantuan, ketidakpahaman siswa dan orang tua mengenai mekanisme program, serta kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan dana.

Penting untuk dicatat bahwa bantuan finansial yang diberikan oleh PIP tidak dapat diukur hanya dengan peningkatan angka partisipasi sekolah atau keberlanjutan pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah. Faktor penting lainnya adalah pengaruh program terhadap kualitas proses belajar-mengajar. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan bisa saja cukup untuk mendukung kelangsungan pendidikan secara kuantitatif, namun belum tentu memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh UNESCO (2020), kualitas pendidikan juga harus dipengaruhi oleh kualitas pengajaran, kurikulum yang relevan, serta lingkungan belajar yang mendukung.

Penelitian yang ada sebagian besar berfokus pada pencapaian angka partisipasi, namun belum cukup banyak yang membahas bagaimana kualitas pengajaran dan hasil pembelajaran siswa dipengaruhi oleh adanya bantuan tersebut, serta bagaimana perubahan tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Hal ini menjadi semakin penting ketika kita mengingat bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh aspek material, tetapi juga oleh kemampuan guru untuk mentransfer pengetahuan dengan efektif, keterlibatan orang tua dalam mendukung proses belajar anak, serta kemampuan lembaga pendidikan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif.

Salah satu contoh dari penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh Simamora (2021) yang menemukan bahwa meskipun PIP dapat mengurangi beban biaya pendidikan, masih ada kendala dalam implementasinya yang memengaruhi kualitas pendidikan, seperti kesulitan administrasi, kurangnya sosialisasi tentang manfaat bantuan, serta kurangnya evaluasi terhadap penggunaan dana oleh penerima manfaat. Selain itu, meskipun program ini dimaksudkan untuk membantu

meningkatkan kesejahteraan peserta didik dari keluarga kurang mampu, pendekatan yang hanya berbasis pada bantuan finansial sering kali gagal mengatasi masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menilai efektivitas program PIP di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie, baik dari segi akses pendidikan yang meningkat maupun kualitas pendidikan yang diterima siswa. Dengan menganalisis implementasi PIP secara sistematis, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat memperbaiki dan mengoptimalkan program PIP ke depan, tidak hanya dari sisi distribusi dana, tetapi juga dari sisi peningkatan kualitas proses pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana program PIP benar-benar memberikan dampak positif terhadap siswa, guru, serta lembaga pendidikan dalam hal akses dan kualitas pendidikan, sehingga program ini bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Secara spesifik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie, terdapat beberapa isu yang belum terjawab mengenai sejauh mana program PIP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Di sisi lain, meskipun banyak penelitian yang menilai keberhasilan program bantuan sosial seperti PIP dalam meningkatkan akses pendidikan, hanya sedikit yang mengeksplorasi hubungan antara bantuan finansial dan peningkatan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah yang menjadi penerima bantuan.

Data observasi awal pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie kondisi fasilitas Pendidikan sudah memadai seperti ruang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sebagian besar ruang kelas dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup, namun tidak semuanya dilengkapi dengan peralatan teknologi seperti proyektor atau komputer.

Beberapa ruang belajar sudah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, tetapi penggunaan tersebut belum merata di seluruh kelas. Begitu juga dengan perpustakaan, laboratorium dan sarana prasarana pendukung lainnya secara umum sudah memadai.

Sebagian besar siswa berasal dari desa-desa di kecamatan dalam Kabupaten Pidie. Ini mencerminkan karakteristik daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian, di mana tingkat pendapatan masyarakat cenderung rendah, sebagian besar berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai petani, pedagang kecil, atau buruh harian. Dari total 852 siswa, sekitar 70% siswa berasal dari keluarga dengan penghasilan yang terbatas, yang menjadi alasan utama mereka mendapatkan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). (Observasi awal, 01 Agustus 2025).

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie, Muhammad Thaifuri, M.Pd, menyatakan bahwa PIP sangat membantu dalam mengurangi beban finansial bagi siswa dari keluarga kurang mampu. “Program ini sangat berarti bagi siswa-siswa kami yang berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah. Tanpa adanya bantuan ini, banyak siswa yang mungkin harus putus sekolah karena kesulitan membayar biaya Pendidikan”. (Wawancara awal, 01 Agustus 2025).

Muhammad Thaifuri, M.Pd juga menyatakan beberapa masalah dalam implementasi PIP, seperti proses penerimaan bantuan tidak melibatkan pihak Madrasah dalam mendata siswa yang berhak menerima PIP, sehingga banyak salah sasaran. “kami tidak bisa banyak berbuat untuk mempercepat proses tersebut”. Kepala Madrasah berharap agar penggunaan dana PIP bisa lebih diarahkan untuk pengembangan kualitas pembelajaran, misalnya untuk mendukung kegiatan

ekstrakurikuler atau kursus tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan akademik siswa. “Kami juga berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel terkait penggunaan dana PIP, yang bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan secara lebih menyeluruh”. (Wawancara awal, 01 Agustus 2025).

Warnidah, S.Pd.I salah seorang guru MAN 1 Pidie pada kesempatan wawancara awal menyatakan bahwa siswa yang menerima bantuan PIP lebih fokus pada pendidikan mereka, terutama pada ujian akhir dan ujian-ujian lainnya. Namun, motivasi siswa untuk belajar lebih dalam belum optimal. Meskipun bantuan ini membantu, kami juga harus berjuang dengan motivasi siswa. Banyak siswa yang merasa cukup dengan hanya lulus ujian, padahal yang kami harapkan adalah mereka bisa mengembangkan potensi mereka lebih jauh lagi." (Wawancara awal, 01 Agustus 2025).

Observasi awal dan wawancara awal pada MAN 1 Pidie menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan dampak yang cukup positif dalam hal akses pendidikan dan reduksi beban biaya. Namun, pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran masih terbatas, terutama karena adanya kendala akses pendidikan, kurangnya pemahaman penggunaan dana, serta terbatasnya pemanfaatan bantuan untuk pengembangan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas PIP dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah ini sangat diperlukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan gap penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu di MAN 1 Pidie?
2. Bagaimana pengaruh PIP terhadap kualitas pembelajaran siswa penerima manfaat di MAN 1 Pidie?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PIP di MAN 1 Pidie?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas penelitian ini akan fokus pada beberapa hal yaitu:

1. Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu di MAN 1 Pidie
2. Pengaruh PIP terhadap kualitas pembelajaran siswa penerima manfaat di MAN 1 Pidie
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PIP di MAN 1 Pidie

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas PIP dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu di MAN 1 Pidie.
2. Untuk mengetahui dampak PIP terhadap kualitas pembelajaran siswa penerima bantuan.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PIP di MAN 1 Pidie.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi keilmuan sosiologi pendidikan, khususnya dalam evaluasi kebijakan pendidikan berbasis bantuan sosial.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait efektivitas program bantuan pendidikan.

1.5.2 Manfaat Praktis:

1. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas PIP.
2. Bagi Madrasah, memberikan masukan dalam pendistribusian dan monitoring PIP.
3. Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya PIP dalam mendukung pendidikan anak.